



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 11690-11703

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Program Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Rusunawa Solokan Jeruk

Sri Damayanti¹, Nurul Rahma Ramdhani^{2✉}, Nayla Rahma Alia³, Rushi Mu'min Aziz⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: rnurul156@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Rusunawa Solokan Jeruk, Jawa Barat. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) digunakan pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, dan keterlibatan aktif PPKS dalam program pemberdayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan kemandirian, dengan beberapa keluarga memulai usaha kecil dan anak-anak kembali bersekolah. Namun, tantangan berupa stigma sosial dan kesulitan adaptasi masih menghambat efektivitas program. Monitoring dan evaluasi rutin sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas intervensi. Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan mengenai pemberdayaan ekonomi PPKS guna memperkuat pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam kebijakan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan PPKS*

Abstract

This study discusses the optimization of improving economic welfare for Social Welfare Service Recipients (PPKS) in Rusunawa Solokan Jeruk, West Java. The Participatory Rural Appraisal (PRA) method was used in this study which aims to identify the potential, needs, and active involvement of PPKS in the empowerment program. The results show that the program has succeeded in increasing independence, with several families starting small businesses and children returning to school. However, challenges in the form of social stigma and difficulties in adaptation still hinder the effectiveness of the program. Routine monitoring and evaluation are essential to ensure the sustainability and effectiveness of the intervention. This study recommends further studies on PPKS economic empowerment to strengthen a more inclusive and sustainable approach in social welfare policy.

Keyword: *Social Welfare, Empowerment, PPKS*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran sentral sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perkotaan, kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi semakin meningkat, termasuk bertambahnya jumlah dan jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Diskominfo Kota Bandung, 2024). Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat termasuk dalam kategori pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial karena memiliki suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar dan memadai dari segi fisik, rohani, dan sosial (Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Contoh PPKS seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana, korban perdagangan orang, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini umumnya mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan yang layak.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah penanganan gelandangan dan fakir miskin yang hidup dalam kondisi serba kekurangan dan tanpa tempat tinggal tetap. Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Kabupaten Bandung, menginisiasi sebuah program penanganan PPKS melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan pemberdayaan ekonomi. Program yang dimulai secara resmi pada akhir tahun 2024 ini tidak hanya bertujuan untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh, tetapi juga untuk memberikan solusi menyeluruh terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran di kalangan PPKS (Diskominfo Kota Bandung, 2024).

Program ini dirancang sebagai bentuk implementasi nyata dari amanat konstitusi, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Witjaksono, 2016). Di samping penyediaan hunian yang layak melalui Rusunawa, program ini juga mencakup pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing PPKS di pasar kerja maupun dalam mendirikan usaha mandiri. Dengan demikian, hunian yang lebih layak disertai dengan fasilitas sosial yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup PPKS serta membuka akses yang lebih besar terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Siburian & Thamrin, 2024).

Durkheim menyampaikan sebuah argumen yang menyatakan bahwa setiap elemen yang ada di masyarakat memiliki peran dan fungsi khusus yang berkontribusi pada kesejahteraan umum. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar PPKS tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat komunitas dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan hunian yang layak (Asrin, 2024). Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk membantu anak terlantar dan fakir miskin dan membangun sistem sosial yang lebih inklusif.

Teori ini menekankan pentingnya struktur sosial dan fungsi-fungsi yang terkait dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial (Fidyawati et al., 2024). Dalam konteks ini, program pemerintah dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki struktur sosial dan fungsi-fungsi yang terkait dalam masyarakat, khususnya bagi PPKS. Dengan menyediakan hunian yang lebih yang lebih teratur dan fasilitas yang lebih baik, serta pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, program ini dapat membantu memahami bagaimana program pemerintah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi PPKS dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi PPKS dan meningkatkan keseimbangan dan stabilitas masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi kinerja program Rusunawa dan pemberdayaan ekonomi untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana struktur sosial baru dapat dibuat dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS. Dengan memahami fungsi program dalam konteks sosial yang lebih luas, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program dalam mencapai tujuannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas dari berbagai program pemerintah dalam menangani PPKS. Penelitian oleh M. Rafli Muhajir dan Fajar Utami Ritonga (Muhajir & Ritonga, 2023) membahas upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Sementara itu, (Yarli et al., 2023) meneliti efektivitas layanan terintegrasi di rumah singgah sebagai model

penanganan PPKS. Penelitian lain oleh (Maryatun et al., 2022) menyoroti kebijakan berbasis panti untuk meningkatkan keberfungsian sosial PPKS.

Namun demikian, sejauh mana program Rusunawa dan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan di Jawa Barat, khususnya di Rusunawa Solokan Jeruk, telah berjalan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi PPKS masih menjadi pertanyaan penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi PPKS di Rusunawa Solokan Jeruk sebagai studi kasus yang relevan dan aktual dalam ranah kebijakan sosial.

METODE PENELITIAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi di Apartemen Transit Solokan Jeruk yang terletak di Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 tahun. Terhitung sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai Desember 2025. Dengan partisipasi dan fokus utama tertuju pada para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Ekonomi) di Kabupaten Bandung. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA). PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Metode PRA ini memiliki paradigma yang sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menganggap masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif dan bukan sekedar obyek. Ini memungkinkan masyarakat desa untuk berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka sendiri tentang kehidupan dan kondisi desa (Widaningsih et al., 2022). PRA menekankan pada peran masyarakat desa yang harus berpartisipasi secara aktif dalam merencanakan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan di wilayah, bukan hanya sebagai objek pembangunan (Makambombu, 2024).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan pendamping, baik dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung maupun dari pihak-pihak lainnya yang memiliki keahlian di bidang pelatihan keterampilan, seperti menjahit dan pengolahan pangan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat penerima manfaat menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan program. Diharapkan sinergi tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, inklusif, serta berkelanjutan.

Metode Kegiatan ini dimulai dari identifikasi dan pemetaan potensi PPKS yang dilakukan oleh Peksos Dinas Sosial, hasil dari pendataan PPKS di rusunawa memiliki minat

pada pelatihan menjahit dan olahan pangan. Selanjutnya perencanaan partisipatif (Gambar 1), diskusi dilakukan untuk memilih materi dan penyesuaian jadwal dengan waktu luang warga, terutama perempuan dan ibu rumah tangga. Setelah itu pelaksanaan pelatihan menjahit (Gambar 2) dan olahan pangan (Gambar 3) dilaksanakan secara partisipatif, dengan mengutamakan praktik langsung. Peserta diberi kesempatan memberi masukan selama proses berlangsung. Kegiatan terakhir yaitu evaluasi kegiatan, peserta dilibatkan dalam mengevaluasi kemajuan keterampilan mereka (Gambar 4).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Menurut Adon Nasrullah Jamaluddin (Jamaludin, 2022) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah warga Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang mengikuti program pelatihan pemberdayaan. Dengan kata lain, penelitian ini akan berpusat pada masalah sebagaimana adanya saat berlangsungnya penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan observasi terhadap 6 warga yang terlibat dalam kegiatan pelatihan. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara dan observasi. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dan terkini. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengumpulan data awal, wawancara dan observasi langsung, hingga analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Kase et al., 2023), yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan menginformasi informasi dari berbagai informan.



Gambar 1. Perencanaan partisipatif melalui diskusi



Gambar 2. Pelatihan menjahit



Gambar 3. Pelatihan olahan pangan



Gambar 4. Evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Khususnya pemerintah Jawa Barat melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi. Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat tiga pilar, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang harus bekerja sama. Program pemberdayaan PPKS di Jawa Barat bergantung pada kolaborasi tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Swasta berperan sebagai lembaga filantropi, dan komunitas lokal yang membantu modal usaha bagi masyarakat, dan pemerintah provinsi menyediakan hunian vertikal yang murah. Menurut teori Durkheim bahwa interaksi fungsional antar-elemen masyarakat menyebabkan stabilitas sosial, sinergi ini meningkatkan social capital di antara penerima manfaat dan komunitas mereka.

Rusunawa Solokan Jeruk dan Apartemen Transit Rancaekek berfungsi sebagai platform pemberdayaan melalui Modul Skrining Kompetensi, yang memeriksa minat dan bakat setiap keluarga sebelum ditempatkan dalam pelatihan. Melalui pelatihan keterampilan, bekerja sama dengan balai latihan kerja dan perguruan tinggi vokasi. Ini mencakup kursus digital marketing, tata boga, dan kerajinan tangan. Selain itu, mentor dari social enterprise dapat membantu dalam fase start-up hingga matang melalui Pendampingan Usaha. Menurut (Paulangan et al., 2018), pemberdayaan berbasis minat meningkatkan rasa kepemilikan usaha dan mempercepat adopsi ketrampilan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian ini mencakup kemandirian dalam berbagai aspek, seperti dalam hal berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka sendiri.

Optimalisasi Program Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi PPKS Melalui Program Pemberdayaan

Program ini menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip kerja sama tiga pilar utama: pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta bertindak sebagai mitra pembangunan, dan masyarakat bertindak sebagai subjek dan objek pembangunan. Untuk membuat ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan, ketiga komponen ini harus bekerja sama. Pemberdayaan ini tidak semata-mata menawarkan bantuan; itu juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang mandiri secara mental dan fisik, dengan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Program Penanganan PPKS Perkotaan di Jawa Barat merupakan salah satu bentuk intervensi terstruktur yang tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga preventif dan promotif. Program PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang ada di perkotaan ini bukan hanya sekadar melakukan relokasi warga dari kawasan kumuh. Relokasi warga dari kawasan kumuh ke hunian vertikal seperti rumah susun menjadi langkah awal. Namun, upaya ini tidak berhenti pada pemindahan fisik semata. Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas pendukung seperti pelatihan keterampilan kerja, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta jaminan sosial. Dengan hunian yang lebih teratur dan fasilitas yang lebih baik di rusun diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.



Gambar 5. Pelatihan Keterampilan

Program penanganan PPKS perkotaan dimulai dengan 98 KK dengan 384 orang yang akan direlokasi ke rumah susun. 33 KK dari Kota Bandung dan 15 KK dari Kota Cimahi akan direlokasi ke Apartemen Transit Rancaekek, dan 50 KK dari Kabupaten Bandung akan direlokasi ke Rusunawa Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pemindahan ini dilakukan tidak secara sembarangan, melainkan berdasarkan proses seleksi dan asesmen sosial yang mempertimbangkan kesiapan, kebutuhan, serta potensi masing-masing keluarga. Program

penanganan ini akan membantu warga miskin ekstrem menjadi lebih baik dan lebih mandiri dengan bekerja sama dengan stakeholders.

Selain menyediakan hunian layak, program ini juga fokus pada pemberdayaan ekonomi peserta melalui pelatihan sesuai dengan minat dan bakat setiap orangnya, melakukan pendampingan untuk menjadi pribadi yang mandiri dalam bekerja ataupun dalam berwirausaha serta memberikan bantuan keuangan kepada mereka selama masa adaptasi. Program ini membantu para warga menjadi lebih mandiri dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan, dan bantuan keuangan.

Tabel 1. Besar bantuan

Dari	Besaran	Keterangan
Pemprov Jabar	Rp. 840.000	Per Kepala Keluarga
Baznas	Rp. 300.000	Per Jiwa
Baznas	Rp. 1.000.000	Per Kepala Keluarga

Bantuan tersebut meliputi Rp840.000 per bulan per kepala keluarga dari Pemprov Jabar, Rp300.000 per bulan per jiwa yang diberikan dari lembaga Baznas, dan Rp 1.000.000 per kepala keluarga untuk perlengkapan rumah tangga. Peserta program juga dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapatkan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan juga BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Namun, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membuat program ini lebih efisien dan berkelanjutan. Mengadakan program pelatihan keterampilan sudah pasti bagus, tetapi pemerintah harus menggunakan metode yang sesuai dengan minat dan potensi warga agar lebih efektif. Misalnya, pelatihan harus disesuaikan dengan pasar online jika seseorang menyukai pertanian, kerajinan tangan, atau ekonomi digital. Jadi, mereka tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk bersaing dan berkembang di era komputer dan internet. Menurut (Yuliana et al., 2020), ada kemungkinan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi secara signifikan dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan warga melalui pelatihan yang tepat.

Dari pantauan awal, program ini berhasil mengubah pola hidup PPKS. Sebagian besar keluarga yang sebelumnya hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat dan bergantung pada belas kasihan masyarakat, kini memiliki tempat tinggal tetap dan mulai menjalani hidup yang lebih stabil. Anak-anak dari keluarga PPKS mulai bersekolah secara formal dan mengikuti proses belajar mengajar secara teratur. Tidak sedikit pula keluarga yang memulai usaha kecil di lingkungan Rusunawa, seperti berdagang makanan, membuka jasa laundry, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang

berbasis komunitas dan dilengkapi dengan dukungan sosial mampu menjadi jalan keluar dari kemiskinan ekstrem.

Kendala dalam Pelaksanaan Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi PPKS

Pelaksanaan program penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang ada di Rusunawa Solokan Jeruk merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi PPKS. Meskipun menunjukkan hasil yang menggembirakan, pelaksanaan program ini di lapangan tidak luput dari berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi dan keberlanjutan. Sebagian besar PPKS yang direlokasi ke Rusunawa berasal dari latar belakang kehidupan jalanan atau lingkungan tidak menetap yang minim aturan. Perubahan mendadak ke lingkungan hunian vertikal yang memiliki aturan tertentu menyebabkan sejumlah penerima manfaat mengalami kesulitan beradaptasi. Kecenderungan untuk melanggar aturan yang sebelumnya sudah ditetapkan seperti kebersihan, jam malam, dan penggunaan fasilitas umum. Ketidaksiapan mental untuk menjalani kehidupan yang lebih terstruktur dan teratur.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai pelatihan keterampilan dan bantuan usaha, sebagian PPKS menunjukkan resistensi atau ketidakminatan dalam mengikuti program pemberdayaan. Disebabkan oleh mentalitas ketergantungan akibat pengalaman panjang menerima bantuan tanpa syarat, trauma masa lalu atau kegagalan usaha yang mengurangi rasa percaya diri, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari kemandirian ekonomi. Karena trauma masa lalu, pengalaman kegagalan, dan ketergantungan mental, tidak jarang warga merasa tidak percaya diri atau tidak tertarik untuk mengikuti pelatihan dan usaha. Mereka sudah terbiasa bergantung pada bantuan, jadi mereka tidak perlu berpikir panjang atau mengubah gaya hidup mereka. Ini menjadi masalah besar karena pemberdayaan hanya akan menjadi formalitas tanpa hasil nyata jika tidak ada keinginan dan keyakinan yang cukup.

Aspek lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya minat dan partisipasi sebagian peserta dalam program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Faktor penyebabnya cukup kompleks, mulai dari mentalitas ketergantungan akibat pengalaman panjang menerima bantuan tanpa syarat, hingga trauma masa lalu yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dan harapan akan masa depan. Beberapa peserta bahkan menganggap bahwa usaha atau pelatihan yang ditawarkan tidak relevan dengan kebutuhan atau potensi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana program untuk melakukan pendekatan psikososial yang tepat serta menyediakan pilihan pelatihan yang beragam dan adaptif terhadap karakteristik peserta pelatihan.

Selain tantangan dari internal peserta program, terdapat pula kendala eksternal yang berasal dari masyarakat sekitar. Tidak semua warga sekitar Rusunawa menerima kehadiran PPKS dengan tangan terbuka. Stigma sosial terhadap para penghuni rusun seperti pelabelan sebagai "gelandangan", "pengemis", atau "bekas kriminal" masih cukup kuat. Hal ini memicu resistensi, bahkan konflik sosial. Kekhawatiran akan meningkatnya angka kriminalitas, kerusuhan, atau penurunan nilai lingkungan menjadi alasan utama penolakan. Padahal, keberhasilan program ini justru sangat ditentukan oleh penerimaan dan integrasi sosial antara penghuni rusun dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dari pemerintah untuk menyosialisasikan tujuan dan manfaat program ini kepada publik. Edukasi dan kampanye publik dapat membantu mengikis stigma dan menciptakan ruang kolaborasi antara warga lama dan warga baru di lingkungan tersebut. Pemerintah juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, serta lembaga keagamaan sebagai mediator untuk meredakan potensi konflik dan memperkuat ikatan sosial.

Dalam jangka panjang, tantangan keberlanjutan program juga perlu menjadi perhatian serius. Program relokasi dan pemberdayaan ini tidak boleh berhenti hanya pada tahap penempatan dan pelatihan awal. Harus ada monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan serta memperbaiki kelemahan. Misalnya, pelacakan terhadap perkembangan usaha kecil yang dirintis oleh peserta, tingkat partisipasi anak dalam pendidikan formal, serta perubahan perilaku sosial mereka. Pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme insentif dan pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa peserta tetap berada dalam jalur kemandirian.

Optimalisasi program penanganan PPKS di Jawa Barat merupakan bukti nyata bahwa intervensi pemerintah yang komprehensif dan berkelanjutan mampu mengubah kehidupan masyarakat miskin ekstrem. Program ini telah membuktikan bahwa dengan hunian layak, dukungan finansial sementara, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap perlindungan sosial, kelompok rentan dapat didorong menjadi mandiri dan produktif. Namun demikian, tantangan adaptasi sosial, resistensi internal, dan penerimaan masyarakat sekitar menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan program ini. Pemerintah sebagai penggerak utama perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sementara sektor swasta dapat berperan dalam membuka akses pasar dan pembiayaan usaha mikro. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat mendukung melalui program literasi keuangan, pendampingan usaha, serta advokasi sosial. Ke depan, model pemberdayaan PPKS di Jawa Barat ini dapat direplikasi di

wilayah lain dengan menyesuaikan konteks lokal masing-masing daerah.

Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah bukan hanya menjadi pemberi bantuan, tetapi mitra dalam transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih bermartabat bagi seluruh warga negara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program penanganan PPKS di Rusunawa Solokan Jeruk telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian hidup. Namun, tantangan seperti stigma sosial, resistensi mental, dan adaptasi budaya masih perlu ditangani secara menyeluruh. Diperlukan monitoring rutin dan pendekatan kolaboratif untuk menjamin keberlanjutan program. Ke depan, disarankan dilakukan eksperimen longitudinal untuk mengukur dampak pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi digital dan pelibatan komunitas lokal secara aktif guna memperkuat ekosistem sosial-ekonomi PPKS yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrin. (2024). *Integrasi Sosial Pada Masyarakat Plural di Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Diskominfo Kota Bandung. (2024, December 25). *Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Hadirkan Perumahan dan Permukiman Layak Bagi PPKS*. Portal JabarProvGOLD.
- Fidyawati, E., Ardi, M., Studi, P., Agama, S., Adab, U., Dakwah, D., Sayyid, U., & Tulungagung, A. R. (2024). Disharmoni Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tulungagung Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(10), 1140–1155. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11652513>
- Jamaludin, A. N. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Aksara.
- Kase, A. D., Sarwindah Sukiatni, D., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research, 3*(2), 301–311.
- Makambombu, S. (2024). Kebijakan, Strategi, Dan Program Pemerintah Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. In W. Yuliani (Ed.), *Pembangunan Masyarakat Desa* (1st ed.). Lingkar Edukasi Indonesia.
- Maryatun, Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Studi pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang

- Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103–117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208>
- Muhajir, M. R., & Ritonga, F. U. (2023). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3, 291–297.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58466/literasi>
- Paulangan, Y. P., Amin, M. A. Al, Wahyudin, Y., & Kodiran, T. (2018). Identifikasi Mata Pencarian Alternatif Masyarakat Lokal Di Calon Kawasan Konservasi Teluk Depapre, Jayapura. *JUMABIS (Jurnal Manajemen & Bisnis)*, 2(2), 1–8.
<https://doi.org/10.55264/jumabis.v2i2.19>
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Siburian, R., & Thamrin, H. (2024). Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Pusat Kota Medan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 120–126.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13347871>
- Widaningsih, L., Malihah, E., & Adriany, V. (2022). Pendekatan Participatory Rural Appraisal dalam Mengembangkan Kemampuan Literasi bagi Masyarakat di Desa Cibeureum Wetan, Sumedang. *Jurnal Abmas*, 22(1), 15–22.
<https://doi.org/10.17509/abmas.v22i1.47585>
- Witjaksono, M. (2016). Analisis Kritis dan Pragmatis Caring Economics sebagai Paradigma baru Kajian Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(2), 217–244. <https://doi.org/10.17977/um002v8i22016p217>
- Yarli, Y., Triyani, E., & Ritonga, F. U. (2023). Penanganan PPKS Melalui Layanan Terintegrasi di Rumah Singgah di Dinas Sosial Kota Medan. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 68–71. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v3i2.1285>
- Yuliana, N., Sartika, D., Nurdin, S. U., Herdiana, N., & Anungputri, P. S. (2020). Introduksi Produk Olahan Ubi Jalar Pada Anggota Ika Tanjung Sakti, Bandar Lampung. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 263–267.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.2718>